Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 1, Nomor 2, Desember 2020
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

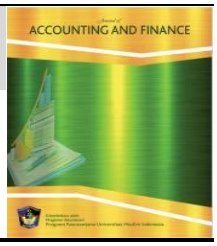


# Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang

**Andry Kusuma[1]*, Abdul Rahman Mus[2], Darwis Lannai[3]**
[1]*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.*

## *ABSTRAK*

*Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. (dibimbing oleh dan Abdul Rahman Mus dan Darwis Lannai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Inspektorat Kab. Enrekang telah sesuai dengan SAP. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2019. Data diperoleh dengan melakukan dokumentansi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang telah menerapkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

***Kata Kunci:*** *Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 71 Tahun 2010*

## *ABSTRACT*

*Presentation of Financial Statements Based on Government Accounting Standards Number 71 of 2010 at the Enrekang Regency Inspectorate. (supervised by and Abdul Rahman Mus and Darwis Lannai). This study aims to determine and analyze the presentation of the Enrekang Regency Inspectorate's financial statements in accordance with SAP. The data used are secondary data, namely the financial statements of the Enrekang Regency Inspectorate in 2019. Data were obtained by conducting documentation and interviews. The analysis method used is the descriptive analysis method. The results of this study indicate that the financial statements of the Enrekang Regency Inspectorate have implemented PP number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.*

***Keywords:*** *Financial Statements, Government Accounting Standards, PP Number 71 of 2010.*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kongkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Indonesia, 2010). Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 terdiri dari tiga lampiran utama yaitu : Lampiran I standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, Lampiran II standar akuntansi berbasis kas menuju akrual, Lampiran III proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berlakunya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Diharapkan dengan adanya perubahan basis tersebut mampu memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah (Duwi, 2016; Mentu & Sondakh, 2016; Sampel et al., 2015).

Menanggapi dikeluarkannya PP 71 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Enrekang sebagai dasar aturan bagi pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat laporan keuangan berbasis akrual . Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman bagi para pengelola keuangan yang ada di setiap OPD lingkup Kabupaten Enrekang dalam menyusun laporan berbasis akrual. Inspektorat Kabupaten Enrekang sebagai salah satu OPD yang ada di wilayah Pemerintah Kab. Enrekang sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya berupa laporan keuangan yang disajikan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, dalam mendukung penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual, diperlukan faktor pendukung berupa SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan harus didukung dengan perangkat pendukung teknis. Fenomena yang terjadi pada Inspektorat Kab. Enrekang adalah masih terdapat fakta terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada saat review yang dilakukan oleh tim reviu inspektorat Kab. Enrekang. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini dikarenakan keterlambatan penyampaian data-data keuangan seperti data beban dibayar di muka yaitu pembayaran surat tanda kendaraan bermotor dan data akumulasi penyusutan aset tetap milik Inspektorat Kab. Enrekang yang selama ini dihitung secara manual tanpa menggunakan aplikasi.

Penelitian terkait penyajian laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan oleh Mentu dan Sondakh (2016). Hasil penelitian Mentu dan Sondakh (2016) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas sosial Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PP No.71 tahun 2010. Hasil penelitian yang berbeda telah ditemukan oleh Purba (2017) menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Deli

Serdang telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Sarana pendukung berupa komputer sudah memadai dan aplikasi SIMDA sudah digunakan dalam penyajian laporan keuangan daerah. Pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sudah memadai tetapi penempatan pegawai sebagai kepala sub bagian keuangan masih sangat kurang. Dengan adanya fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. Oleh karenanya, studi ini mengalamatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yakni:

Tabel 1: Rumusan dan Tujuan Penelitian

| Rumusan Masalah | Tujuan Penelitian |
|---|---|
| 1. Apakah penyajian laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2019 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010? | 1. U ntuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan SAP. |

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: (1) Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori dari hasil penelitian yang diperoleh pada tempat peneliti bekerja. (2) Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Berbasis Akrual dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai Penyajian Laporan Keuangan pemerintahan berbasis akrual. (3) Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan menjadi bahan masukan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.

## Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means pada tahun 1932 (Mizruchi, 2004) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yaitu menjelaskan bagaimana pihak yang terkait dalam suatu entitas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat akan berperilaku, karena mereka pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda. Mengacu pada teori keagenan (agency theory), dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Eisenhardt, 1989) . Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan yang berkualitas, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam

suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship) (Mitnick, 2015). Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang praktek pelaporan keuangan yang baik (berkualitas) di pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal. Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Noreen, 1988).

**Penatausahaan Keuangan Daerah**

Bagian yang terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penatausahaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya (Sipahutar, 2018). Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal (Bodnar & Hopwood, 2006). Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Indonesia, 2004). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.Berbagai peraturan pemerintah dan peraturan lain juga disesuaikan oleh Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmedagri Nomor 29 Tahun 2002.

Permendagri No.29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Kepmendagri ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan PP Nomor 105 tahun 2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD. Permendagri No.13 Tahun 2006 juga mengatur tentang prosedur akuntansi pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri ini juga mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan.

**Laporan Keuangan Pemerintah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi dan kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan keuangannnya. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu; dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu (Aliyah, 2012). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, secara spesifik, tujuan pelaporan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi keutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam aktivitasnya.

Menurut PSAP 01 paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur/bupati/walikota

sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: "Kepala satuan perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan." Oleh karena itu, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. (3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Masing – masing unsur yaitu (a)Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat di ukur dalam satuan uang. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. (4) Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas,. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara / Daerah. Sedangkan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara / Daerah. (5) Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang di cakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun beban adalah kewajiban pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan transfer ialah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. (6) Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. (7) Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan dan infomasi lain yang diharuskan dan di anjurkan untuk di ungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal yaitu mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas Akuntansi, menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang di hadapi dalam pencapaian target, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang di sajikan pada lembar laporan keuangan, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

**Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan

yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No. 2. KSAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni (1) relevan, informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut: (a) Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. (b) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. (2) Andal, berupa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut: (a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. (3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (4) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

**Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010**

Terdapat perbedaan antara PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP-PP lain karena pada PP No. 71 Tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang dilaksanakan selambat-lambtanya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh

aturan yang ada pada PP 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

| **PP 24 Tahun 2005** | **PP 71 Tahun 2010** |
|---|---|
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)<br>- Tidak Ada Perubahan | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)<br>- Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya :<br>1. Saldo Anggaran Lebih awal,<br>2. Penggunaan SAL<br>3. Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan<br>4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya<br>5. Lain-lain<br>6. Saldo Anggaran Lebih Akhir. |
| Neraca<br>- Ekuitas Dana terbagi :<br>1. Ekuitas Dana Lancar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran saldo anggaran lebih.<br>2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangan panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.<br>3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang- perundangan. | Neraca<br>- Hanya ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.<br>- Saldo ekuitas di Neraca berasal dan saldo akhir ekuitaspada Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Laporan Arus Kas<br>- Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan | Laporan Arus Kas<br>- Disajikan oleh unit yang mepunyai fungsi perbendaharaan umum |
| - Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. | - Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. |
| Laporan Kinerja Keuangan<br>- Bersifat optional<br>- Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual<br>- Sekurang-kurangnya menyajina pos-pos:<br>1. Pendapatan dari kegiatan operasional.<br>2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi.<br>3. Surplus atau defisit. | Laporan Operasional<br>- Merupakan laporan keuangan pokok<br>- Menyajikan pos-pos berikut:<br>1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.<br>2. Beban dari kegiatan operasional.<br>3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional bila ada pos luar biasa, bila ada surplus/defisit-LO. |
| Laporan Perubahan Ekuitas<br>- Bersifat optional | Laporan Perubahan Ekuitas<br>- Merupakan Laporan Keuangan Pokok |

| | |
|---|---|
| - Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :<br>1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.<br>2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas.<br>3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. | - Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :<br>1. Ekuitas awal<br>2. Surplus defisit-LO pada periode bersangkutan.<br>3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dan persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.<br>4. Ekuitas akhir. |
| CALK<br>- Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru. | CALK<br>- Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama. |

## Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian Laporan Keuangan daerah memerlukan faktor pendukung berupa Sumber Daya Manusia dan Perangkat pendukung teknis. Dalam penyusuna dan penyajian (e.g., Kiranayanti & Erawati, 2016) menyatakan bahwa kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Alimbudiono & Andono (2004) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Rina et al., 2017).

Perangkat pendukung teknis, erangkat utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Laudon (2007) menyatakan bahwa perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan dan output dalam sebuah sistem informasi. Sedangkan perangkat lunak adalah sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem informasi. Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan

selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintah daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011; Chamidah et al., 2020). Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Enrekang. Adapun waktu yang diperlukan adalah 2 (dua) bulan yaitu September 2020 sampai dengan November 2020. Jenis data penelitian adalah data sekunder berupa informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah data sejarah singkat Inspektorat Kabupaten Enrekang, struktur organisasi dan data informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: (1) Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan sehubungan dengan analisis penyajian laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. (2) Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (3) Analisis dan pengolahan data, dengan menggabungkan data yang diperoleh dari teknik wawancara dan teknik dokumentasi dengan landasan teori hasil studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk perbaikan-perbaikan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi dan Model Analisis Data Kualitatif. (Miles & Huberman, 1984). Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data reduction, data display dan conclusion. (1) Data Reduction (Reduksi Data), data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek- aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang. (2) Data Display, setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplay-kan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks dan network (jejaring kerja).

**Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penatausahaan Keuangan**

Daerah adalah bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah berupa asas dan pelaksanaan keuangan daerah yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan APBD. (2) Laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang membutuhkan. (3) Sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai atau tenaga- tenaga bidang akuntansi untuk melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. (4) Perangkat pendukung tehnis adalah ketersediaan perangkat pendukung berupa komputer yang membantu pegawai menyelesaikan tugasnya dalam penyusunan dsn penyajian laporan keuangan daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisa Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Enkrekang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Dalam hal ini disajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yaneg sah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Kemudian terdapat pula pos surplus/defisit yang memuat informasi mengenai selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Klasifikasi untuk pemubiayaan berdasarkan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, pembiayaan neto. Terakhir pos sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang berisi informasi selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

### Analisa Laporan Operasional (LO)

Menyusun Laporan Operasional (LO) dapat langsung dihasilkan dengan mengambil data akun- akun kode rekening 8 untuk pendapatan-LO dan kode rekening 9 untuk Beban. Laporan operasional Inspektorat Kab. Enrekang dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Laporan Operasional Per 31 Desember 2019 Dan 2018

| NO | URAIAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN** | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah-LO | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Lain-Lain PAD yang Sah - LO | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | **PENDAPATAN TRANSFER - LO** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Bantuan Keuangan - LO | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 12 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Pendapatan Hibah – LO | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dana Darurat - LO | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| 17 | JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 26 | BEBAN | 8.486.129.729,01 | 8.774.438.045,90 |
| 27 | BEBAN OPERASI - LO | 8.486.129.729,01 | 8.774.438.045,90 |
| 28 | Beban Pegawai - LO | 3.947.403.687,00 | 4.096.064.117,00 |
| 29 | Beban Barang dan Jasa | 4.072.411.703,00 | 4,139,584,316,33 |
| | Beban Persediaan | 455.277.500,00 | 540.084.248,00 |
| 30 | Beban Jasa | 342.491.314,00 | 142.594.567,00 |
| 31 | Beban Perjalanan Dinas | 3.246.021.071,00 | 3.429.486.413,00 |
| 32 | Beban Pemeliharaan | 28.621.818,00 | 27.419.088,33 |
| 33 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Beban Hibah | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 191.204.260,00 | 224.978.663,57 |
| | Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Beban Lain-lain | 275.110.079,00 | 279.244.451,00 |
| | | | |
| 40 | BEBAN TRANSFER | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Beban Transfer Keuangan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| 47 | JUMLAH BEBAN | 8.486.129.729,01 | 8.774.438.045,90 |
| | | | |
| 48 | JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI | (8.486.129.729,01) | (8.774.438.045,90) |
| | | | |
| 49 | SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SURPLUS NON OPERASIONAL - LO | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Jumlah Surplus Non Operasional | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 55 | DEFISIT NON OPERASIONAL | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Defisit Penyelesian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Jumlah Defisit Non Operasional | 0,00 | 0,00 |
| 61 | JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NON OPERASIONAL | | |
| | | | |
| 62 | SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (8.486.129.729,01) | (8.774.438.045,90) |
| | | | |
| 63 | PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Jumlah Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 67 | BEBAN LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Beban Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Jumlah Beban Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| 70 | JUMLAH BEBAN LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 71 | SURPLUS / DEFISIT – LO | (8.486.129.729,01) | (8.774.438.045,90) |

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Enrekang 2019

Berdasarkan laporan LO Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2019 di atas diperoleh nilai defisit sebesar Rp.8.486.129.729,01 yang diperoleh dari beban beban operasi yang terdiri dari beban pegawai Rp.3.947.403.687,00, beban barang dan jasa Rp4.072.411.703,00 beban penyusutan Rp.191.204.260,00 dan beban lain-lain sebesar Rp.275.110.079,00. Diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam menyajikan laporan operasional (LO) telah menerapkan PP Nomor 71 tahun 2010. Laporan operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam menyajikan laporan operasional telah menerapkan PP No.71 Tahun 2010 dan mengacu pada PSAP 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional Inspektorat Kabupaten Enrekang telah menyajikan pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, (b) Beban dari kegiatan operasional, (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional, (d) Kegiatan Non operasional, (e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa, (f) Pos Luar Biasa, (g) Surplus/defisit-LO.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mantiri, Saerang dan Elim (2016) yang menyatakan bahwa mencakup kegiatan operasional dan kegiatan non operasional, pos-pos yang terdapat dalam kegiatan operasional antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO, untuk pos beban didalamnya terdapat beban pegawai-LO, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi dan lain sebagainya. Untuk kegiatan non operasional antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, Surplus dari kegiatan Non operasonal Lainnya-LO dan lain sebagainya.

**Analisa Neraca**

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2019 menyajikan pos-pos aset yang terbagi

menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terakhir pos ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Selain itu, neraca Inspektorat Kabupaten Enrekang juga menyajikan posisi keuangan tahun sebelumnya yakni tahun 2018 sebagai pembanding dengan tahun 2019. Berikut Neraca Inspektorat Kabupaten Enrekang periode 2018 dan 2019. Berdasarkan Neraca Inspektorat Kab. Enrekang tahun 2019 di atas diperoleh nilai total aset sebesar Rp. 1.331.159.769,97 yang terdiri dari aset lancar Rp.3.607.419,50, aset tetap Rp.1.274.464.350,47 dan aset lain-lain sebesar Rp. 53.088.000,00 sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas didapatkan sebesar Rp.1.331.159.769,97 yang terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp. 8.927.461,00, utang jangka panjang sebesar Rp. 0,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp. 1.322.232.308,97 yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. Neraca daerah merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam menyusun neraca dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Inspektorat Kabupaten Enrekang telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengkasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Tabel 7. Neraca Per 31 Desember 2019 Dan 2018

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| | **ASET** | **1.331.159.769,97** | **1.408.487.797,98** |
| **1** | **ASET LANCAR** | **3.607.419,50** | **2.862.687,50** |
| 2 | Kas dan Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Piutang Pendapatan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Dibayar Dimuka | 2.666.919,50 | 1.982.687,50 |
| 9 | Persediaan | 940.500,00 | 880.000,00 |
| 10 | Aset Untuk Dikonsolidasikan | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **11** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Investasi Jangka Panjang Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | |
| **35** | **ASET TETAP** | **1.274.464.350,47** | **1.405.625.110,48** |
| 36 | Tanah | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| 37 | Peralatan dan Mesin | 1.752.583.473,00 | 1.766.522.573,00 |
| 38 | Gedung dan Bangunan | 695.566.750,00 | 695.566.750,00 |
| 39 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Akumulasi Penyusutan | (1.548.685.872,53) | (1.431.464.212,52) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | | | |
| | **DANA CADANGAN** | **0,00** | **0,00** |
| | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 45 | **ASET LAINNYA** | **53.088.000,00** | **0,00** |
| 46 | Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| | Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Aset Lain-lain | 53.088.000,00 | |
| 49 | **TOTAL ASET** | **1.331.159.769,97** | **1.408.487.797,98** |
| 50 | | | |
| | **KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | |
| 52 | **KEWAJIBAN** | **8.927.461,00** | **6.237.487,00** |
| 53 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **8.927.461,00** | **6.237.487,00** |
| 54 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Perhitungan Pihak ke Tiga (PPK) | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | 8.927.461,00 | 6.237.487,00 |
| 55 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **0,00** | **0,00** |
| 56 | Utang Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | | |
| 59 | EKUITAS | 1.322.232.308,97 | 1.402.250.310,98 |
| 60 | Ekuitas | (15.545.098.460,03) | (7.112.056.731,02) |
| 61 | RK PPKD | 16.867.330.769,00 | 8.514.307.042,00 |
| 62 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1.331.159.769,97 | 1.408.487.797,98 |

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Enrekang menyajikan laporan neraca telah sesuai dengan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan mengacu pada PSAP 01. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mantiri, Saerang dan Elim (2016) yang menyatakan bahwa neraca dalam PP No.71 tahun 2010, penyajian aset disajikan menurut klasifikasi aset lancar dan aset non lancar, Penyajian kewajiban disajikan menurut klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan penyajian ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewaiban pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan penyusunan laporan keungan pada Inspektorat Kab. Enrekang, masih diperlukan sumber daya manusia yang memilliki kompetensi yang memadai seperti pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Disamping itu, pegawai yang bekerja pada pengelolaan keuangan

Inspektorat Kab. Enrekang perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Penggunaan Aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan pada Inspektorat Kab. Enrekang juga masih perlu dilakukan peningkatan kemampuan yang selama ini masih menggunakan aplikasi berbasis desktop menjadi aplikasi berbasis online sehingga proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari penginputan data sampai pada penyajian laporan keuangan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Alimbudiono, R. S., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, 5(02), 18–30.

Aliyah, S. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. Unisnu.

Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Bustamam, B., Ibrahim, R., & Saputra, D. (2015). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 2(1), 82–91.

Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2020). Penta helix Element Synergy as an Effort to Develop Tourism Villages in Indonesia. JURNAL MANAJEMEN BISNIS, 8(1), 1–22.

Duwi, S. (2016). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Studi pada Kabupaten Sarolangun. Universitas Andalas.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74.